AMBIGUITAS HUKUM BATASAN SESEORANG MENGUMUMKAN STATUS MANTAN NARAPIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM

Isyaura Nadhira Fatah Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nadhiraisyaura@gmail.com
I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ambiguitas frasa media massa dalam mekanisme pelaksanaan pengumuman status mantan narapidana dalam pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya pedoman yang jelas dalam peraturan pelaksana mengenai pengumuman status mantan narapidana dalam pemilihan umum di Indonesia sehingga menyebabkan kekaburan yang sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai mekanisme pengumuman status mantan narapidana dalam pemilu. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih tegas dan harmonisasi dengan prinsip-prinsip pemilu untuk menghindari adanya penyimpangan kepentingan dalam pelaksanaan pemilu.

Kata Kunci: Ambiguitas Hukum, Mantan Narapidana, Pemilihan Umum, Transparansi, Media Massa.

ABSTRACT

This research aims to examine the ambiguity of the phrase mass media in the mechanism for announcing the status of ex-convicts in elections. The research method used is normative research with an approach to statutory regulations and court decisions. The research results show a lack of clear guidelines in implementing regulations regarding the announcement of the status of ex-convicts in general elections in Indonesia, resulting in ambiguity which often creates legal uncertainty regarding the mechanism for announcing the status of ex-convicts in elections. Therefore, it is necessary to update regulations that are stricter and harmonize with election principles to avoid any deviation from interests in the implementation of elections.

Key Words: Legal Ambiguity, Ex-Convicts, General Elections, Transparency, Mass Media.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara hukum atau yang sering disebut dengan istilah *Rechtsstaat* merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman utama bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan.¹ Paradigma ini menekankan bahwa kekuasaan negara tidak boleh berjalan berdasarkan kehendak sewenang-wenang atau dominasi kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Sebaliknya, negara hukum harus mendasarkan segala tindakannya pada aturan hukum yang berlaku, yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan

¹ Laurensius Arliman. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum". *Doctrinal 2*, no. 2 (2020): 509-532.

perlindungan hak-hak dasar masyarakat.² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ini menunjukkan bahwa semua aspek kehidupan nasional dan internasional dan bernegara, termasuk pengelolaan kekuasaan pemerintahan, wajib berpedoman pada hukum positif. Hukum positif di Indonesia sendiri mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan puncaknya adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara.³ Ciri utama dari negara hukum di Indonesia dapat diidentifikasi melalui beberapa elemen kunci. Pertama, eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia. Kedua, keberadaan peradilan yang independen dan efektif menjadi syarat mutlak untuk menegakkan hukum dan keadilan, termasuk dalam menangani kasus yang melibatkan pemerintah atau pejabat negara. Ketiga, pemerintahan harus berjalan berdasarkan peraturan atau yang dikenal dengan konsep *Wetmatigheid Van Bestuur*, di mana setiap tindakan pemerintah wajib sesuai dengan hukum yang berlaku. Keempat, negara hukum harus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti hak atas keadilan, kebebasan berekspresi, rasa aman, dan hak-hak lain yang dijamin oleh konstitusi.⁴

Indonesia, selain dikenal sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), juga diakui sebagai negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional.⁵ Dalam negara demokrasi, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, merupakan contoh nyata dari kedaulatan rakyat. Pemilihan umum memberikan kesempatan penting bagi warga untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan negara sekaligus menjadi fondasi pembentukan pemerintahan yang sah dan berlandaskan kehendak rakyat. Negara yang menganut asas kedaulatan rakyat mengakui bahwa pemilihan umum adalah instrumen utama dalam mewujudkan prinsip demokrasi.⁶ Hal ini berlaku tidak hanya pada sistem demokrasi liberal, tetapi juga diadaptasi, meskipun dengan karakteristik yang berbeda, dalam sistem otoriter maupun totaliter. Dalam konteks negara yang berbasis kedaulatan rakyat, pemilu seringkali diibaratkan sebagai tolok ukur sejauh mana prinsip demokrasi dijalankan dan dijadikan simbol dari keberhasilan metode pemerintahan berbasis kerakyatan. Di Indonesia, pemilihan umum tidak hanya menjadi alat formal, tetapi juga menjadi elemen penting dalam pembentukan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu diatur untuk berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia (*Luber Jurdil*), sehingga dapat mencerminkan

² Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam". *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 235-245.

³ Fikri Hadi. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia". *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170-188.

⁴ Bobi Aswandi dan Kholis Roisah. "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128-145.

⁵ Hulain, Markoni, Achmad Edi Subiyanto, dan Joko Widarto. "Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional". *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 15121-15142.

⁶ Asshiddiqie, Jimly, Edisi Revisi, dan Ketua Mahkamah Konstitusi RI. "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi". *Jurnal* 6 (2006).

aspirasi masyarakat secara autentik.⁷ Pemilu tidak hanya sekedar memilih pemimpin, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap hak politik setiap individu. Menurut Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang inklusif, representatif, dan bertanggung jawab.

UUD NRI 1945 menggarisbawahi pentingnya hak memilih dan dipilih sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental. Pemilu menjadi sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan kebijakan negara, baik dalam pemilihan legislatif, eksekutif, maupun kepala daerah. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar," yang memberikan pemahaman bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi Indonesia berada di tangan rakyat, dan salah satu cara untuk menyalurkan kekuasaan itu adalah melalui pemilu.

Dalam konteks ini, pemilu bukan hanya sekedar mekanisme pengisian jabatan politik, tetapi juga merupakan cerminan dari prinsip demokrasi itu sendiri, yaitu pemerintahan yang berasal dari dan untuk rakyat. Dengan adanya pemilu yang bebas, jujur, dan adil, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memilih wakil atau pemimpin yang mereka anggap dapat mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. Oleh karena itu, pemilu dianggap sebagai bagian integral dari hak politik yang tidak bisa dipisahkan dari kewajiban negara untuk menjamin pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sah.

Keterkaitan antara pemilu dan prinsip negara hukum dalam UUD 1945 semakin jelas dengan pernyataan bahwa negara berkewajiban melindungi hak politik warganya, yang salah satunya adalah hak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pemilu yang diselenggarakan tanpa adanya hambatan, intimidasi, atau gangguan lain adalah cerminan dari upaya negara untuk menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang juga diatur dalam konstitusi. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat menyalurkan hak politiknya dalam keadaan yang adil dan aman. Dalam hal ini, pemilu bukan hanya sekedar proses administratif, tetapi juga proses politik yang mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan sosial dan demokrasi.

Prinsip kebebasan dalam pemilu yang dijamin oleh negara menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemilu dapat menjalankan hak politik mereka tanpa adanya paksaan, manipulasi, atau pengaruh dari pihak tertentu. Pemilu yang bebas dan adil mencakup aspek keberagaman partisipasi politik, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap integritas sistem pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan ini tidak hanya diatur dalam konstitusi, tetapi juga harus dijalankan dengan mekanisme hukum yang jelas, yang tercermin dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pemilu yang memastikan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas.

⁷ Rais, Andi Muhammad Safwan, Samsul Wahidin, Riski Febria Nurita, dan Raditya Feda Rifandhana. "Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019". *Journal Unmar 2*, no. 2 (2021).

Lebih lanjut, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terlaksananya pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Hal ini mencakup pengawasan terhadap praktik-praktik yang dapat merusak integritas pemilu, seperti politik uang, intimidasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran ini adalah bagian dari komitmen negara untuk menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Dengan demikian, negara berperan tidak hanya sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan proses tersebut berjalan dengan adil dan transparan.

Selain itu, keberhasilan pelaksanaan pemilu yang adil juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, bukan hanya dalam memberikan suara tetapi juga dalam mengawasi proses pemilu. Pendidikan pemilih dan kesadaran politik yang tinggi sangat penting untuk memastikan bahwa hak memilih tidak hanya dipahami sebagai hak yang bersifat formal, tetapi juga sebagai kewajiban moral untuk memilih pemimpin yang mampu menjalankan tugas dengan baik demi kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu, pemilu juga dapat dilihat sebagai sarana untuk memperkuat integrasi sosial dan politik di masyarakat, karena proses ini melibatkan setiap elemen masyarakat dalam menentukan masa depan bersama.

Secara keseluruhan, pemilu dalam kerangka UUD NRI 1945 lebih dari sekadar mekanisme untuk memilih pemimpin, melainkan juga merupakan fondasi dari kedaulatan rakyat dan penerapan prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara berkewajiban untuk melindungi hak politik warga negara, memastikan keadilan dan kebebasan dalam pelaksanaan pemilu, serta menegakkan aturan yang jelas untuk menghindari pelanggaran yang dapat merusak integritas demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, pemilu yang jujur, bebas, dan adil merupakan landasan bagi terciptanya pemerintahan yang sah dan terpercaya, serta sebagai wujud nyata dari demokrasi yang menghargai hak asasi manusia.

Hak asasi manusia (HAM), sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu, memiliki keterkaitan erat dengan konsep negara hukum.⁸ HAM berfungsi menerjemahkan nilai-nilai martabat manusia ke dalam sistem hukum yang dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui lembaga peradilan.⁹ Dalam konteks pemilu, hak untuk memilih dan dipilih bukan hanya menjadi kebutuhan negara untuk melegitimasi kekuasaan, tetapi juga merupakan cara bagi warga negara untuk memahami relevansi peran mereka dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, pemilu menjadi alat untuk menyelaraskan semangat bernegara dan berbangsa, sekaligus menciptakan ruang partisipasi yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

Pembahasan mengenai partisipasi mantan narapidana dalam pemilu, khususnya bagi mereka yang pernah terlibat dalam kasus korupsi, merupakan tema yang kompleks dan sensitif. Hal ini mengangkat berbagai perspektif mengenai hak politik, rekonsiliasi sosial, dan integritas sistem politik. Dalam konteks ini, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu memberikan ketentuan yang memadai terkait dengan syarat pencalonan, khususnya bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satu poin penting yang diatur dalam pasal tersebut adalah ketentuan tentang mantan narapidana yang pernah

⁸ Gaffar, Janedjri M. "Peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggaraan pemilu." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 1-32.

⁹ Nawawi, Asror. "Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM Di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2017).

dipidana penjara dengan hukuman lima tahun atau lebih. Meskipun ketentuan ini membatasi mantan narapidana untuk mencalonkan diri, terdapat pengecualian jika mereka mengungkapkan secara terbuka dan jujur kepada publik mengenai status mereka sebagai mantan terpidana.

Batasan tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan penting mengenai hak politik mantan narapidana, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam kasus korupsi yang sering kali dianggap sebagai tindakan kejahatan yang merugikan masyarakat secara luas. Beberapa pihak berpendapat bahwa pelaku tindak pidana korupsi seharusnya tidak diberi kesempatan untuk kembali terlibat dalam proses politik karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka. Di sisi lain, ada juga yang menganggap bahwa hak politik adalah hak dasar setiap warga negara yang tidak seharusnya dicabut meskipun seseorang telah menjalani hukuman.

Menariknya, Pasal 240 UU Pemilu justru memberikan celah yang memungkinkan mantan narapidana untuk mendaftar sebagai kandidat legislatif, asalkan mereka terbuka mengenai masa lalu mereka. Ketentuan ini membuka ruang bagi proses rekonsiliasi dan pengampunan sosial, di mana seseorang yang telah menjalani hukuman dapat kembali berpartisipasi dalam kehidupan politik, dengan syarat bahwa mereka tidak menutupi atau menyembunyikan riwayat hukum mereka. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada individu untuk membuktikan bahwa mereka telah berubah dan memiliki komitmen untuk berkontribusi pada pembangunan negara.

Sementara itu, Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memperjelas prosedur pencalonan bagi mantan narapidana, dengan kewajiban mencantumkan riwayat hidup dan melampirkan bukti pengumuman di media massa, baik lokal maupun nasional. Hal ini memastikan bahwa informasi mengenai status mantan terpidana dapat diakses oleh publik secara transparan. Pengumuman ini penting untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif apakah mereka ingin memberikan dukungan kepada calon legislatif tersebut, dengan mengetahui latar belakang hukumnya. Proses ini juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, di mana calon legislatif tidak hanya mengungkapkan masa lalu mereka tetapi juga menunjukkan kesiapan untuk menghadapi penilaian publik.

Namun, mekanisme ini juga tidak lepas dari kritik. Meskipun proses transparansi ini penting, banyak yang berpendapat bahwa pengungkapan masa lalu melalui media massa dapat menimbulkan stigma sosial yang sulit dihilangkan. Masyarakat yang telah terpapar informasi mengenai kejahatan yang dilakukan oleh seorang calon legislatif mungkin akan sulit untuk melihatnya secara objektif. Selain itu, meskipun calon tersebut sudah mengungkapkan statusnya, belum tentu publik siap menerima mereka kembali dalam kapasitas pemerintahan. Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan bagaimana masyarakat memandang tindakan korupsi dan apakah rekonsiliasi tersebut dapat benar-benar terjadi dalam ranah politik.

Pada akhirnya, persoalan ini menyentuh pada keseimbangan antara hak individu untuk berpartisipasi dalam proses politik dan tanggung jawab sosial untuk menjaga integritas sistem demokrasi. Setiap kebijakan yang diambil, baik itu berupa pengecualian terhadap mantan narapidana atau pemberian ruang bagi mereka untuk

mencalonkan diri, harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.¹⁰

Dalam konteks perkembangan teknologi, media massa telah mengalami perluasan makna dan mencakup berbagai bentuk seperti berita cetak, artikel daring, blog, podcast, hingga platform media sosial.¹¹ Ketidaktegasan dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan media massa dapat menimbulkan perbedaan interpretasi. Misalnya, apakah pengumuman melalui akun media sosial pribadi bakal calon atau melalui platform berbasis daring lainnya dianggap memenuhi ketentuan ini? Selain itu, tidak adanya standar kualitas atau kriteria yang jelas terhadap media massa dapat membuka peluang manipulasi, seperti penggunaan media yang kurang kredibel untuk menyampaikan informasi tersebut. Ambiguitas ini juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi bakal calon maupun bagi penyelenggara pemilu. Di satu sisi, bakal calon dapat kebingungan dalam memenuhi kewajiban hukum karena kurangnya petunjuk teknis yang spesifik. Di sisi lain, penyelenggara pemilu menghadapi tantangan dalam memastikan kepatuhan dan validitas dokumen yang disampaikan. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai definisi media massa dalam konteks pengumuman status mantan narapidana. Regulasi yang lebih spesifik dapat mencakup jenis media yang diakui, standar kredibilitas media, dan format pengumuman yang sah.

Terdapat penelitian terdahulu berupa jurnal dengan judul "Hak Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum" yang ditulis oleh Gede Nofantara Putra, I Gusti Bagus Suryawan, Ida Ayu Putu Widiati¹² yang ditunjukkan oleh studi sebagai perbedaan antara menjaga hak asasi manusia, terutama hak politik, dan menjaga pemilu yang bersih sebagai bagian dari pemerintahan yang bersih. Salah satu fokusnya yaitu Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 yang mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota pemilu. Selain itu, juga terdapat penelitian terdahulu lainnya yaitu berupa jurnal dengan judul "Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan" dengan penulisnya Noer Sida.¹³ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai isu hukum penting yaitu hak politik mantan narapidana, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pencalonan diri sebagai pejabat publik atau anggota legislatif. Penelitian ini melihat ketentuan dalam hukum internasional dan nasional yang menjamin hak politik sebagai hak asasi manusia, dengan fokus pada bagaimana penerapannya di Indonesia. Perbedaan yang paling mencolok dari antara kedua penelitian terdahulu tersebut dan penelitian ini yaitu terletak pada fokus pembahasannya, dalam penelitian ini penulis akan lebih membahas mengenai mekanisme pelaksanaan pengumuman mantan narapidana yang berfokus pada analisis ambiguitas pada frasa "media massa" serta dalam pembahasan dari penelitian ini tidak ada limitasi terhadap suatu tindak pidana.

¹⁰ Nubli, Ahmad. "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹¹ Kustriyono, Erwan, dan Vega Prisma Kurniawati. "Perubahan makna dan faktor penyebab perubahan makna dalam media cetak." *Jurnal Bahastra Universitas Pekalongan* 35, no. 2 (2016): 13-25.

¹² Putra, Gede Nofantara, I. Gusti Bagus Suryawan, dan Ida Ayu Putu Widiati. "Hak Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 447-451.

¹³ Sida, Noer. "Hak Mantan Narapidana Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan." *Justitia et Pax* 34, no. 2 (2018).

1.2. Rumusan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pengumuman status mantan narapidana dalam pencalonan anggota legislatif berdasarkan UU Pemilu dan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018?
2. Bagaimana implikasi ambiguitas dalam definisi media massa terhadap kepastian hukum dan hak politik mantan narapidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pengumuman status mantan narapidana dalam pencalonan anggota legislatif dan mengkaji ambiguitas dalam definisi media massa yang digunakan dalam Pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 serta memberikan rekomendasi pengaturan hukum yang lebih spesifik untuk mengatasi ambiguitas dan memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan inklusif.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif, yang merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami norma-norma hukum yang berlaku.¹⁴Data untuk penelitian ini diperoleh melalui metode studi pustaka, di mana peneliti mengumpulkan berbagai sumber informasi dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu. Pengelompokan data dilakukan berdasarkan jenis-jenis sumber hukum yang tersedia, dengan klasifikasi yang jelas untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Setelah data dikelompokkan, peneliti melakukan analisis terhadap setiap klasifikasi tersebut dengan tujuan membandingkan teori-teori yang ada, baik dari pendapat para ahli hukum maupun dari peraturan yang berlaku. Analisis yang digunakan bersifat kualitatif, di mana peneliti berfokus pada pengumpulan dan interpretasi data deskriptif. Hal ini dilakukan dengan cara mengolah dan membahas setiap data yang telah dikumpulkan, guna memperoleh pemahaman yang mendalam terkait permasalahan hukum yang diteliti. Peneliti kemudian menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan memulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang lebih spesifik. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan norma-norma hukum yang dianalisis, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum yang relevan dengan topik penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pengumuman Status Mantan Narapidana Dalam Pencalonan Anggota Legislatif

Pengaturan mengenai status mantan narapidana saat pencalonan legislatif adalah salah satu masalah yang sangat menantang bagi perancang sistem politik yang inklusif, sembari tetap menjaga integritas institusi. Hak setiap warga negara untuk

¹⁴ Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, dan M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. (Prenada Media, 2018).

berpartisipasi dalam politik adalah hak asasi manusia yang paling penting dalam demokrasi.¹⁵ Namun, pelaksanaan hak tersebut membutuhkan pengaturan khusus untuk memastikan bahwa mereka yang memegang jabatan publik mampu memenuhi standar integritas dan akuntabilitas yang tinggi.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022, apabila terlaksana secara terbuka dan jujur mengungkapkan status mereka kepada publik, mantan narapidana dapat mencalonkan diri. Ketentuan ini mencerminkan dua prinsip hukum utama, yaitu prinsip kesetaraan hak yang menegaskan bahwa mantan narapidana tetap memiliki hak politik sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial, serta prinsip transparansi yang mengharuskan calon legislatif mengungkapkan masa lalu mereka sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemilih. Namun, implementasi ketentuan ini sering menghadapi kendala teknis dan substansial, seperti kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif dan beragamnya interpretasi tentang bentuk pengungkapan yang "terbuka dan jujur."

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 memberikan penegasan penting mengenai hak politik mantan narapidana. Dalam putusan tersebut, MK menekankan perlunya pedoman yang lebih jelas untuk mengatur pengungkapan status mantan narapidana agar aturan ini tidak disalahgunakan atau diterapkan secara diskriminatif.¹⁶ MK juga mengingatkan pentingnya perlindungan hak konstitusional individu yang merasa dirugikan oleh ketidakpastian hukum dalam regulasi pemilu. Meski begitu, keputusan MK ini menyisakan tantangan besar bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu. Ketiadaan mekanisme implementasi yang jelas berpotensi menimbulkan persoalan.

Kontroversi mengenai pengaturan ini juga mencuat pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang mewajibkan pengungkapan status mantan narapidana dalam pencalonan legislatif. Beberapa ketentuan dalam peraturan ini, seperti Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3, dikritik karena dianggap bertentangan dengan UU Pemilu. Mahkamah Agung (MA) akhirnya memutuskan bahwa ketentuan dalam peraturan tersebut tidak berlaku, karena melampaui kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Keputusan ini menegaskan bahwa lembaga pelaksana pemilu, seperti KPU, tidak memiliki kewenangan untuk membuat regulasi yang mengubah atau menambah substansi yang diatur dalam undang-undang.

Selain aspek hukum, pelaksanaan peraturan ini juga menghadirkan tantangan sosial dan politik. Misalnya, kewajiban pengungkapan status mantan narapidana melalui media massa, seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018, sering kali menimbulkan stigma sosial yang sulit dihilangkan. Meskipun bertujuan untuk transparansi, pendekatan ini juga berisiko menyebabkan mantan narapidana yang telah keluar dari masa hukuman dan berusaha kembali berkontribusi kepada masyarakat. Selain itu, persepsi negatif masyarakat terhadap mantan

¹⁵ Sadeadema, Valentina Mariama. "Pemilu dan Korupsi: Dilema Konstestasi Caleg Mantan Napi Korupsi Pada Pileg 2019." *Jurnal Transformative* 5, no. 2 (2019): 52-72.

¹⁶ Adelia. "Putusan MK nomor. 87/PUU/XX/2022 yang membatalkan UU Pemilu no 7 tahun 2017 pasal 240 ayat (1) huruf g tentang pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif dan relevansinya dengan Siyasa syariah." PhD diss., UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

narapidana sering kali menjadi hambatan dalam proses pencalonan, meski pengungkapan status telah dilakukan sesuai ketentuan.

Untuk mengatasi berbagai persoalan ini, pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu merancang pedoman teknis yang jelas terkait mekanisme pengungkapan status mantan narapidana, termasuk format, media, dan waktu pengumuman. Selain itu, edukasi politik kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman mengenai hak politik mantan narapidana. Pendekatan ini bertujuan menciptakan proses pemilu yang lebih inklusif dan adil, tanpa mengesampingkan prinsip transparansi dan integritas. Di sisi lain, harmonisasi regulasi antara undang-undang dan peraturan pelaksana juga harus diperkuat, agar tidak terjadi konflik hukum yang merugikan masyarakat.

Dengan pendekatan yang komprehensif, pengaturan ini diharapkan tidak hanya memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk berkontribusi dalam politik, tidak hanya itu, tetapi juga meningkatkan demokrasi melalui proses reintegrasi sosial yang adil dan terbuka. Pada akhirnya, hal ini dapat membantu mencapai keseimbangan antara menjaga hak asasi manusia dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi.

3.2. Implikasi Ambiguitas Dalam Definisi Media Massa Terhadap Kepastian Hukum dan Hak Politik Mantan Narapidana

Media massa adalah alat komunikasi yang cepat dan efektif untuk menyampaikan informasi, pesan, atau hiburan kepada khalayak luas. Media massa mencakup berbagai platform, dari yang konvensional seperti televisi, surat kabar, dan lain-lain hingga yang lebih modern seperti media sosial, dan berita digital.¹⁷ Dalam penggunaannya, media massa memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, media massa berperan dalam menyampaikan informasi yang relevan bagi masyarakat, seperti perkembangan politik, ekonomi, budaya, atau peristiwa penting lainnya. Selain itu, media massa juga menjadi sarana pendidikan dengan menyediakan konten yang informatif dan mendidik untuk menambah wawasan serta pengetahuan publik. Media massa juga berfungsi sebagai alat hiburan dengan menyediakan berbagai jenis konten yang menarik, seperti musik, film, dan acara TV, yang dapat dinikmati oleh semua orang. Selain fungsi tersebut, media massa juga memainkan peran penting dalam kontrol sosial. Dengan menyoroti isu-isu yang relevan dan memberikan ruang bagi diskusi publik, media massa dapat membantu masyarakat memahami dan mengkritisi berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Lebih jauh, Media massa juga mempengaruhi opini dalam ruang publik, di mana cara pemberitaan dan *framing* informasi dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu isu.¹⁸ Di era modern, peran media massa semakin meluas. Tidak hanya sebagai alat penyebaran informasi, media digital kini memungkinkan interaksi langsung antara penyedia informasi dan pengguna. Dengan fitur seperti kolom komentar, pembagian konten, dan partisipasi dalam diskusi, media massa telah menjadi ruang dialog yang dinamis dan interaktif bagi masyarakat.

Ambiguitas dalam definisi media massa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 menimbulkan berbagai implikasi serius

¹⁷ S. I., Ema, dan M. Si. *Pengantar Komunikasi Pendidikan* (Probolinggo, Eureka Media Aksara, 2024), 72.

¹⁸ Kusumaningsih, Rila. "Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan". *JISHUM Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no.1 (2024):27-40.

terhadap kepastian hukum dan hak politik mantan narapidana. Ketidaktegasan dalam mendefinisikan media massa menciptakan ketidakpastian dalam implementasi hukum, terutama bagi bakal calon yang harus memenuhi kewajiban untuk mengumumkan statusnya. Kebingungan ini muncul karena tidak adanya kejelasan apakah platform seperti media sosial, blog pribadi, atau portal berita daring berskala kecil dapat dianggap memenuhi syarat yang ditetapkan.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum antara bakal calon dan penyelenggara pemilu terkait validitas pengumuman yang dilakukan. Selain itu, ambiguitas ini dapat menyebabkan diskriminasi dalam pelaksanaan hak politik. Bakal calon dengan akses terbatas ke media massa arus utama dapat menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban tersebut, sementara calon lain dengan sumber daya lebih besar dapat dengan mudah memanfaatkan media yang lebih kredibel. Ketidaksetaraan ini tidak hanya merugikan hak individu, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam proses demokrasi. Implikasi lainnya adalah meningkatnya risiko manipulasi informasi. Ketidakjelasan mengenai standar kredibilitas media memungkinkan penggunaan media yang kurang terpercaya untuk menyampaikan pengumuman, sehingga dapat merugikan integritas informasi yang diterima masyarakat. Akibatnya, persepsi publik terhadap bakal calon dapat terdistorsi, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap pemilu itu sendiri. Ambiguitas juga dapat memperburuk stigma sosial yang dihadapi oleh mantan narapidana. Pengumuman yang tidak konsisten atau dilakukan melalui media yang tidak relevan dapat memicu interpretasi yang salah dari masyarakat, sehingga memperpanjang dampak negatif bagi individu yang bersangkutan. Lebih jauh, hal ini merusak prinsip demokrasi dan keadilan pemilu, karena ketidakjelasan aturan mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan revisi terhadap peraturan yang ada, khususnya dalam mendefinisikan media massa secara lebih spesifik dan relevan dengan perkembangan teknologi. Penetapan standar yang jelas mengenai media yang diakui, format pengumuman yang sah, serta pedoman teknis pelaksanaan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Selain itu, edukasi publik dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan peraturan penting untuk memastikan bahwa hak politik mantan narapidana dilindungi tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan integritas pemilu.

4. Kesimpulan

Ketentuan hukum yang mengatur pengumuman status mantan narapidana dalam pencalonan anggota legislatif berdasarkan UU Pemilu dan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018, apabila terlaksana secara terbuka dan jujur mengungkapkan status mereka kepada publik, mantan narapidana dapat mencalonkan diri. Ketentuan ini mencerminkan dua prinsip hukum utama, yaitu prinsip kesetaraan hak yang menegaskan bahwa mantan narapidana tetap memiliki hak politik sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial, serta prinsip transparansi yang mengharuskan calon legislatif mengungkapkan masa lalu mereka sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemilih.

Implikasi ambiguitas dalam definisi media massa mempunyai dampak signifikan terhadap kepastian hukum dan hak politik mantan narapidana. Ketidaktegasan dalam mendefinisikan media massa menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi bakal calon yang harus memenuhi persyaratan pengumuman status sebagai mantan narapidana, maupun bagi penyelenggara pemilu dalam menilai keabsahan dokumen tersebut. Hal tersebut berpotensi menciptakan diskriminasi

dalam pelaksanaan hak politik serta membuka peluang manipulasi informasi melalui penggunaan media yang kurang kredibel, sehingga mempengaruhi persepsi publik terhadap bakal calon serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ema, S. I., and M. SI. *Pengantar Komunikasi Pendidikan*. (Probolinggo: Eureka Media Aksara 2024)

Jurnal:

Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 235-245.

Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509-532.

Asshiddiqie, Jimly, Edisi Revisi, dan Ketua Mahkamah Konstitusi RI. "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi." *Jurnal* 6 (2006).

Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128-145.

Gaffar, Janedjri M. "Peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggaraan pemilu." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 1-32.

Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170-188.

Hulain, Markoni Markoni, Achmad Edi Subiyanto, dan Joko Widarto. "Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional." *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 15121-15142.

Kustriyono, Erwan, dan Vega Prisma Kurniawati. "Perubahan makna dan faktor penyebab perubahan makna dalam media cetak." *Jurnal Bahastra. Universitas Pekalongan* 35, no. 2 (2016): 13-25.

Kusumaningsih, Rila. "Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan". *JISHUM Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no.1 (2024) :27-40.

Nawawi, Asror. "Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM Di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2017).

Putra, Gede Nofantara, I. Gusti Bagus Suryawan, dan Ida Ayu Putu Widiati. "Hak Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 447-451.

Rais, Andi Muhammad Safwan, Samsul Wahidin, Riski Febria Nurita, dan Raditya Feda Rifandhana. "Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019." *Journal Unmar* 2, no. 2 (2021).

Sadeadema, Valentina Mariama. "Pemilu dan Korupsi: Dilema Konstestasi Caleg Mantan Napi Korupsi Pada Pileg 2019." *Jurnal Transformative* 5, no. 2 (2019): 52-72.

Sida, Noer. "Hak Mantan Narapidana Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan." *Justitia et Pax* 34, no. 2 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Putusan MK Nomor 87/PUU/XX/2022.

Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.